



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK UTARA

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Rencana Kerja 2023 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Tanjung, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Utara



HAIRUL ANWAR, S.Kom
NIP. 19691231 200112 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
BAB III TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo 2022	50
BAB V PENUTUP	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	17
Tabel 2.2.	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 2.3.	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lombok Utara	33
Tabel 3.1.	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023	44
Tabel 4.1.	: Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Utara khususnya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya, Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara merupakan Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana telah diubah dengan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai pelaksana Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Komunikasi Dan Informatika.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.

Sebagaimana Visi Bupati Lombok Utara terpilih, yaitu : **“LOMBOK UTARA BANGKIT MENUJU KABUPATEN YANG INOVATIF, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026, diemban 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Aspiratif dan Transparan Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berbudaya dan Religius;
3. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dengan tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Ketangguhan Terhadap Bencana;
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah berbasis IPTEK dan kearifan lokal serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan ketersediaan lapangan kerja;

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Bupati, peran Diskominfo Kabupaten Lombok Utara merujuk pada Misi **Kesatu** yaitu terkait dengan “Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Aspiratif dan Transparan Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi”.

Sedangkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka tujuan utama Kementerian Komunikasi sebagai fokus

pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023. Adapun Tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan PD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang- undang, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023).
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis Perangkat Daerah, organisasi dalam Perangkat Daerah, tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Renja RKPD
Memuat tentang Renja anggaran kegiatan Perangkat Daerah dan anggaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki; dan
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam

- penyusunan perencanaan tahun 2023; dan
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada Tahun 2022 Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan DPPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.774.058.173,- Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 5.471.348.005,- atau 95%.

Hasil masing-masing program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 3.334.482.175,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.247.944.714,- atau 97% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 93,71%, dengan keluaran kegiatan yaitu terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan kegiatan selama 1 Tahun berupa terpenuhinya jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan realisasi 99,99% dengan keluaran tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah selama 1 tahun.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 77,35% dengan keluaran terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam 1 tahun berupa penyediaan komponen instalasi listrik kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- d. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi 92,38% dengan keluaran Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yaitu pengadaan mebel 3 unit dan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 3 unit.
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi 100% dengan keluaran berfungsinya Sarana Prasarana yang ada di Dinas Kominfo dalam Kondisi Baik dalam 1 tahun.
 - f. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan realisasi 99,42% dengan keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun.
 - g. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 93,37% dengan keluaran Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 1 tahun berupa laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan, laporan keuangan akhir tahun dan laporan keuangan bulanan.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 814.470.198,- dengan realisasi sebesar Rp. 763.336.950,- atau 93.72% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan realisasi anggaran sebesar 99.78% dengan keluaran tersusunnya dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik selama 1 tahun.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran sebesar 98,26%, dengan keluaran kegiatan tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik selama 12 bulan.
 - c. Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dengan realisasi anggaran sebesar 99,17% dan dengan keluaran kegiatan peningkatan kapasitas sumber Daya

Komunikasi Publik selama 1 tahun.

- d. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan nilai realisasi anggaran sebesar 62,96%, dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan.
 - e. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai realisasi anggaran 99,43% dan dengan keluaran kegiatan yaitu tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.
 - f. Kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik dengan nilai realisasi sebesar 99,92% dengan keluaran tersusunnya dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik selama 1 tahun.
 - g. Kegiatan pelayanan informasi publik dengan nilai realisasi sebesar 88,88% dengan keluaran tersusunnya dokumen hasil pelayanan informasi publik selama 1 tahun.
3. Program Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.404.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 915.076305,- atau 88,98% yang terdiri dari 2 program kegiatan yaitu :
1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - a. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 90% dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.
 - b. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan realisasi sebesar 100% dengan keluaran kegiatan terpasangnya sistem jaringan intra Pemerintah Daerah /Kabupaten sebanyak 6 unit di 6 OPD Kabupaten Lombok Utara.

2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,16% dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Berbasis Elektronik.
 - b. Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik dengan realisasi anggaran sebesar 32,84% dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - c. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dengan realisasi sebesar 98,65% dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan realisasi sebesar 97,42% dengan keluaran kegiatan yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.
 - e. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik dengan realisasi sebesar 100% dengan keluaran kegiatan yaitu Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan.
 - f. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas dengan realisasi anggaran sebesar 84,37% dengan keluaran kegiatan tersusunnya dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City.
 - g. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 87,05% dengan keluaran tersusunnya dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan realisasi sebesar 70,68% dengan keluaran kegiatan tersusunnya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE selama 1 tahun.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 312.475.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 283.529.340,- atau 90,74% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar 90,64% dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sehingga tersusunnya buku INKESRA, Buku KLU dalam data dan buku PDRB.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi dengan realisasi kegiatan sebesar 94,68% dengan keluaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas SDM dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.
 - c. Pengembangan Infrastruktur dengan realisasi kegiatan sebesar 91,99% dengan keluaran kegiatan tersedianya infrastruktur penunjang kegiatan statistic sebanyak 1 unit.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 284.226.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 261.460.696,- atau 91,99% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 97,26% dengan keluaran kegiatan adalah Terbinanya Perangkat Daerah dalam menerapkan layanan keamanan informasi sebanyak 30 Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan pelaksanaan Analisis Kebutuhan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemda/kota dengan realisasi anggaran sebesar

81,46% dengan keluaran kegiatan tersusunnya laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan informasi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- c. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemda Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya dokumen hasil kegiatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan selama 1 tahun.
- d. Operasional jaring Komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan keluaran kegiatan yaitu terbinanya Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi sebanyak 30 perangkat daerah selama 1 tahun.

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara s/d Tahun 2022 (tahun berjalan), kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Kabupaten Lombok Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		%	92	100	100	99	99	94.76	97.75	106.25
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia Tahun n-1	%	92	100	100	100	100	100	99.83	108.51
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	24	3	3	100	17	44.00	2.59
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	16	1	1	100	4	21.00	5.25
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	4	1	1	100	12	17.00	1.42
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4	1	1	100	1	6.00	6.00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3.00	3.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	22	19	22	22	100	25	66.00	3.00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	4	1	1	100	12	17.00	1.42
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4	12	12	100	1	17.00	17.00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	4	12	12	100	14	30.00	2.14
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Adminitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	%	92					91.3946421	30.46	0.33
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17					17	17.00	1.00
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1					1	1.00	1.00
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16					16	16.00	1.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin dan Kapasitas Aparatur Diskominfo							0	0.00	0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Diskominfo Yang Diadakan	Paket			1	1	100	0	1.00	102.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Sistem Informasi Kepegawaian yang Tersusun							0.00	0.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Diskominfo Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang			2	2	100	0	2.00	#DIV/0!
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100					83,07	27.67	0.28
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4	1	1	100	6	11.00	1.83
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	4	1	1	100	10	15.00	1.50
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	4	1	1	100	3	8.00	2.67
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	4	1	1	100	3	8.00	2.67
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4	1	1	100	1	6.00	6.00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4	12	12	100	12	28.00	2.33
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	%	100				-	98,14	32.67	0.33
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Sewa			2	2	100	0	2.00	-
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	3	1	1	100	2	6.00	3.00
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaaan komputer, Printer dan alat-alat elektronik	Paket	4	8	1	1	100	4	13.00	3.25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	%	100				93,09	31.00	0.31	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	16	12	12	100	12	40.00	3.33
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48	12	12	100	12	72.00	6.00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	48	12	12	100	12	72.00	6.00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	%	100				97,945	32.67	0.33	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	40	10	10	100	10	60.00	6.00
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	16	4	4	100	11	31.00	2.82
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4	1	1	100	1	6.00	6.00
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase Informasi Publik dan Penyebarluasan Informasi Publik		100				93,72	31.00	0.31	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diselenggarakan Diskominfo		100				93,72	31.00	0.31	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	0	2	1	1	100	0	3.00	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	3	1	1	100	1	5.00	5.00
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	3	1	1	100	0	4.00	-
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	3	1	1	100	1	5.00	5.00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	3	1	1	100	1	5.00	5.00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	3	1	1	100	12	16.00	16.00
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dokumen	1	4	1	1	100	30	35.00	35.00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	4	1	1	100	1	6.00	6.00
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1	4	1	1	-	1	6.00	6.00
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika Yang Terbangun		80	89				88,98	29.67	0.37
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan domain dan sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah		100	99				99	66.00	0.66

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	Dokumen	1	4	0	0		1	5.00	5.00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	Unit	6	4	0	0		6	10.00	1.60
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah KLU		100	87				87,35	58.00	0.58
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	Dokumen	1	4	1	1	100	1	6.00	6.00
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1					1	1.00	1.00
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1				1	2.00	2.00
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	30	30			-	30	60.00	2.00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2		1	1	100		1.00	0.50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan		0				0	0.00	-
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	3	1	1	100	30	34.00	34.00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	3				1	4.00	4.00
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen		0				0	0.00	-
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	4				1	5.00	5.00
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistik Sektoral yang terbangun		100	91				90,74	60.67	0.61
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		100	91				90,74	60.67	0.61
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	4	1	1	100	1	6.00	6.00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	20	45				20	65.00	3.25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.20.02.2.01.03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	6	30				0	30.00	5.00
2.20.02.2.01.04	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	40	0				30	30.00	0.75
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	2	4				2	6.00	3.00
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen		0				0	0.00	-
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di KLU		85	92				92	61.33	0.72
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Utara		100	95				95	63.34	0.63
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	2	4				2	6.00	3.00
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	0	0		4	8.00	2.00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	0	0	12	12	1	0	12.00	-
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30						60.00	2.00
					30	0	0		30		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara		100	100	0	0		100	66.68	66.68
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	3	0	0	0		3	3.00	1.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara.

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 (tahun berjalan) dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan Umum yaitu :

1. Pengembangan jaringan di Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menuntaskan/menghilangkan area blank spot di Kabupaten Lombok Utara;
2. Penyediaan layanan internet untuk SKPD dan Publik Area;
3. Monev menara telekomunikasi sehingga tersedianya data jumlah menara telekomunikasi yang beroperasi di KLU dalam rangka peningkatan PAD dari retribusi menara telekomunikasi;
4. Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Sosialisasi mengenai penggunaan internet yang sehat bagi pelajar di Kabupaten Lombok Utara;
6. Penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media baik online maupun offline;
7. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik berupa radio, media online dan televisi;
8. Peningkatan Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah;
9. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lombok Utara 2022 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi semakin

meningkat dan beragam;

6. Wilayah geografis relative luas dengan tofografi perbukitan dan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak;
7. Masih adanya wilayah yang kapasitas sinyal BTS-nya masih lemah di Kabupaten Lombok Utara, sehingga diperlukan adanya alat penguat sinyal.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi, tidak hanya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten Lombok Utara.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lombok Utara, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Kabupaten Lombok Utara. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Lombok Utara.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lombok Utara dari sisi internal antara lain:

1. Dukungan kebijakan pemerintah dan penganggaran cukup baik dan memadai;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai *stakeholder* cukup tinggi dan terbuka;
3. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi cukup tinggi;
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan komunikasi;

5. Kesadaran akan pentingnya data, informasi dan statistik yang cukup dan akurat sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengembangan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai "entry point" atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindaklanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut:

1. Sarana komunikasi dan desiminasi informasi belum optimal.

Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara. Demikian halnya dengan Diskominfo sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kabupaten Lombok Utara, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dan akan dicapai sejauh ini.

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana komunikasi dan desiminasi informasi belum optimal. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Diskominfo Kabupaten Lombok Utara sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistik memiliki tanggung jawab yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan di bidang tersebut.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, dukungan ketersediaan perangkat dan sistem pengintegrasian data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tentunya optimalisasi diseminasi informasi akan tercapai.

2. Informasi publik belum menyentuh masyarakat secara merata.

Komunikasi dan informatika merupakan kegiatan pelayanan transmisi, merupakan jaringan yang penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping mempunyai fungsi sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil, komunikasi dan informatika juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan serta anggota masyarakat. Demikian pentingnya manfaat bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat banyak, maka perlu ditempuh berbagai kebijaksanaan, yang pokok-pokoknya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan, meningkatkan pemerataan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta melaksanakan yang diamanatkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik.

3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas.

Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang kurang memadai sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Lombok Utara khususnya di daerah pedesaan.

Dengan peningkatan infrastruktur yang memadai diharapkan masyarakat akan semakin semangat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia, sehingga penerapan dari visi dan misi kabupaten dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai.

4. Peningkatan kompetensi aparatur bidang komunikasi dan informatika.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan aparatur yang mengelola bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam bidang komunikasi dan informatika guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, Namun demikian untuk perencanaan Tahun 2023 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dan hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8,827,478,225	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4,582,420,568
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia Tahun n-1	92	%	3,654,694,437	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	%	3,866,449,344
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Dokumen	41,001,450	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	38,461,500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Perencanaan (Rencana Kerja) SKPD Yang Tersusun	4	Dokumen	26,192,880	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	5	Dokumen	22,505,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD yang Tersusun	12	Dokumen	7,367,850	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo KLU	12	Dokumen	7,290,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Yang Tersusun	1	Dokumen	7,440,720	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	5	Dokumen	8,666,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1		2,402,654,828	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	1		2,813,859,184
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo KLU	Jumlah ASN Yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	12	Bulan	2,296,096,523	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo KLU	12	Bulan	2,731,969,484
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo KLU	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1000	SPJ	93,039,345	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo KLU	1000	SPJ	68,130,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dokumen	6,660,990	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo KLU	1	Dokumen	7,460,200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Yang Tersusun	2	Dokumen	6,857,970	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Diskominfo KLU	2	Dokumen	6,299,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13	Dokumen	6,653,984	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	13		9,380,100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Diskominfo KLU	Jumlah Laporan BMD Yang tercatat/Terjaga Keamanannya	1	Dokumen	3,889,019	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Diskominfo KLU	1	Dokumen	3,346,100

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian			Kebutuhan Dana(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD Bulanan Yang tersusun	12	Laporan	2,764,965	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo KLU	12	Laporan	6,034,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	Persentase Tingkat Disiplin dan Kapasitas Aparatur Diskominfo			51,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo KLU			5,212,600	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo KLU	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya	30	Stel	30,000,000.00		Diskominfo KLU	30	Stel		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Diskominfo KLU	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Laporan	15,000,000.00		Diskominfo KLU		Laporan		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo KLU	Jumlah ASN Diskominfo Yang Meningkatkan Kapasitasnya	2	Orang	6,000,000.00		Diskominfo KLU	30	Orang	5,212,600	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo KLU				195,403,320	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo KLU			143,832,865	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo KLU	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Gedung Kantor Yang Diadakan	6	Jenis	5,377,365.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo KLU	6	Jenis	2,754,505	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo KLU	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Yang Diadakan	9	Jenis	21,941,010.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo KLU	9	Jenis	13,189,560	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo KLU	Jumlah Makanan Minuman Yang Disediakan	3	Jenis	23,920,470.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo KLU	3	Jenis	15,454,800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo KLU	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3	Jenis	9,069,375	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo KLU	3	Jenis	3,540,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo KLU	Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	900	Eksemplar	6,552,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo KLU	900	Eksemplar	3,120,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo KLU	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	12	Bulan	128,543,100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo KLU	12	Bulan	105,774,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	100	%	237,033,950	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	100	%	7,500,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo KLU	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	3	Unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo KLU	3	Unit		
	Pengadaan Mebel	Diskominfo KLU	Jumlah Mebel Yang Diadakan	14	Unit	7,033,950	Pengadaan Mebel	Diskominfo KLU	14	Unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo KLU	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	6	Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo KLU	6	Unit	7,500,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian			Kebutuhan Dana(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo KLU	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100	%	618,596,205	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	Diskominfo KLU	100	%	734,989,100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo KLU	Jumlah Surat keluar Yang Tercatat/Teregister	500	Surat	6,951,420	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo KLU	500	Surat	7,461,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo KLU	Jumlah Tagihan Air, Listrik dan Jaringan Internet Yang Terbayarkan	30	Tagihan / Rekening	195,784,785	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo KLU	30	Tagihan/ Rekening	207,877,700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo KLU	Jumlah Jasa Umum Kantor Yang Terbayarkan Honorariumnya	23	Orang	415,860,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo KLU	23	Orang	519,650,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo KLU	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100	%	102,350,700	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	Diskominfo KLU	100	%	113,213,995	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo KLU	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Terpelihara dan Dalam Kondisi Baik	10	Unit	84,350,700	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo KLU	10	Unit	80,334,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo KLU	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara dan Dalam Kondisi Baik	11	Unit	8,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskominfo KLU	11	Unit	22,429,995	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo KLU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	10,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo KLU	2	Unit	10,450,000	
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	Prosentase Informasi Publik dan Penyebarluasan Informasi Publik	100		781,859,958	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	100		306,279,600	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diselenggarakan Diskominfo	100		781,859,958	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100		306,279,600	
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Yang Tersusun	0	Perda/ Perbub	35,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	0	Perda/ Perbub	0	
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	Opini/ Aspirasi	33,712,350	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo KLU	12	Opini/ Aspirasi	9,367,000	
3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	250	Berita/ Informasi	55,591,620	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	250	Berita/ Informasi	2,517,000	
4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	250	Kali	282,383,640	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	250	Kali	19,787,600	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian			Kebutuhan Dana(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Laporan	139,045,200	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	1	Laporan	175,992,000	
6	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	Permohonan		Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo KLU	5	Permohonan	14,483,500	
7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30	Orang	9,428,895	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	30	Orang	6,994,000	
8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	23	KIM	75,232,815	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo KLU	23	KIM	26,703,500	
9	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3	Unit	151,465,438	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	3	Unit	50,435,000	
III.	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo KLU	Persentase Aplikasi Informatika Yang Terbangun	80		3,460,988,100	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo KLU	80		275,352,000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Persentase Pengelolaan Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	100	%	289,868,040	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100	%	0	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Jumlah Domain/Sub Domain Yang Dikelola Diskominfo Kabupaten Lombok Utara	30	Sub Domain	29,908,095	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	30	Sub Domain		
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	Jumlah OPD Yang Terpasang Jaringan Internetnya Oleh Diskominfo	30	OPD	259,959,945	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	30	OPD		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	100	%	3,171,120,060	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100	%	275,352,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Jumlah Masyarakat/Pelajar Yang Tersosialisasikan Internet Sehat	100	Orang	23,436,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100	Orang	
2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo KLU	Jumlah Perda/Perbup SPBE Yang Ditetapkan	1	Perda/Peubup	100,000,000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo KLU	1	Perda/Peubup	25,073,700
3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	Jumlah OPD Yang Terkoneksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	15	SKPD	35,000,000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	15	SKPD	9,270,800
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo KLU	Jumlah Aplikasi Pengelola Data dan Informasi Elektronik Yang Dikelola	1	Aplikasi	20,756,610	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo KLU	1	Aplikasi	29,668,300
5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo KLU	Jumlah Aplikasi Pemerintah Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	2	Aplikasi	450,000,000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo KLU	2	Aplikasi	
6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo KLU	Jumlah Perangkat Daerah yang Terintegrasi Infrastruktur TIK		Jaaringan Internet	1,000,000,000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo KLU		Jaaringan Internet	
7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo KLU	Jumlah Akses Wifi Gratis Publik Area Yang Terpasang	25	Lokasi	1,236,281,000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo KLU	25	Lokasi	191,978,200
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Monev Menara Telekomunikasi	5	Laporan	231,079,800	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	5	Laporan	11,388,000
9	Pngelolaan Government Chif Information Officer (GCIO)	Diskominfo KLU	Jumlah SDM Terlatih Penatalaksanaan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Orang	60,000,000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo KLU		Orang	
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Monev Ekosistem SPBE Yang Tersusun	1	Laporan	14,566,650	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo KLU	1	Laporan	7,973,000
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo KLU	Persentase Statistik Sektoral yang terbangun	100		430,245,960	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo KLU	100		67,841,124

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian			Kebutuhan Dana(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Persentase Dokumen Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	100	%	430,245,960	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100	%	67,841,124	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen INKESRA Yang Tercetak	50	Buku	232,410,465	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo KLU	50	Buku	35,160,700	
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo KLU	SDM Diskominfo Yang Meningkatkan Kapasitas di Bidang Statistik	30	Orang	39,446,400	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo KLU	30	Orang	7,200,000	
3	Membangaun Meta Data Statistik Sektoral	Diskominfo KLU	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadana sektoral sesuai standar		%	20,000,000	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Diskominfo KLU		%	12,725,000	
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo KLU	Persentase Perangkat Daerah yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaan		%	30,000,000	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral	Diskominfo KLU		%	12,755,424	
5	Pengembangan Infrastruktur	Diskominfo KLU	Jumlah Sarana dan Prasarana Statistik Yang Diadakan	2	Unit	98,389,095	Pengembangan Infrastruktur	Diskominfo KLU	2	Unit		
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo KLU	Persentase Perangkat Daerah yang menandatangani komintmen terkait Satu Data Indonesia		%	10,000,000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Diskominfo KLU		%		
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo KLU				499,689,770	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pngamanan Informasi	Diskominfo KLU			66,498,500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo KLU	Persentase Indeks Penyelenggaraan Persandian Pada Pemeritah Daerah KLU	100	%	499,689,770	Penyelenggaraan Persandian untuk Pngamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100	%	66,498,500	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pngamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pngamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Yang Terlaksana	100	%	444,612,020	Penyelenggaraan Persandian untuk Pngamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100	%	50,698,500	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian			Kebutuhan Dana(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemda	2	Perda/Perbup	10,526,250	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	2	Perda/Perbup	3,747,000	
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang persandian dan keamanan informasi	70	Orang	210,000,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	70	Orang	14,000,000	
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo KLU	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi entitas audit keamanan informasi	15	OPD	20,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo KLU	15	OPD	2,513,500	
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Indeks kepuasan pengguna terhadap layanan keamanan informasi	80	%	204,085,770	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	80	%	30,438,000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara Yang Tersakana	100	%	55,077,750	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	100	%	15,800,000	
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	Jumlah Infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi	3	Paket	55,077,750	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	3	Paket	15,800,000	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara harus merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang kominfo akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang kominfo masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla. Adapun visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah : **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan di prioritaskan pada upaya meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital dan Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi :

- 1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- 2 Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- 3 Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- 4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Pelaksana di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 adalah: **“LOMBOK UTARA BANGKIT MENUJU KABUPATEN YANG INOVATIF, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**,

Sedangkan Misi yang ditetapkan dalam upaya mencapai Visi tersebut adalah:

1. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Aspiratif Dan Transparan Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**, yaitu untuk menghadirkan aparatur yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Lombok Utara.
2. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berbudaya dan Religius**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui layanan pendidikan merata, , menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya Lombok Utara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. **Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Dan Ketangguhan Terhadap Bencana**, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan aman bencana dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang adaatif terhadap bencana.
4. **Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis IPTEK Dan Kearifan Lokal Melalui Optimalisasi Sumber Pendanaan serta Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha Dan Ketersediaan Lapangan Kerja**, yaitu pengelolaan sumberdaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan IPTEK dan kearifan lokal untuk memberikan nilai tambah serta menumbuhkan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Dinas komunikasi dan Informatika berperan dalam pencapaian visi Kepala daerah melalui misi pertama, yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Aspiratif Dan Transparan Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi”

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Bupati, peran Diskominfo Kabupaten Lombok Utara tertuang pada Misi **Pertama** yaitu terkait dengan

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Aspiratif Dan Transparan Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi”.

Visi dan Misi Dikominfo dijabarkan dalam berbagai program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD. Program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara terpilih tahun 2021 – 2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya.

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023 Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Lombok Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4,582,420,568				9,773,425,381	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran dan Perencanaan yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan tepat waktu		100 %	3,866,449,344				4,352,734,812	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu		100 %	38,461,500			100 %	43,051,523	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	4 Dokumen	22,505,500	PAD		5	Dokumen	27,502,524
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo KLU	12 Laporan	7,290,000	PAD		12	Laporan	7,736,243
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	1 Laporan	8,666,000	PAD		5	Laporan	7,812,756
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo KLU		2,813,859,184				3,090,786,221	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo KLU	25 orang/Bulan	2,731,969,484	DAU		30	orang/Bulan	2,978,900,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo KLU	12 Dokumen	68,130,500	PAD		12	Dokumen	97,691,312
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo KLU	1 Laporan	7,460,200	PAD		1	Laporan	6,994,040
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo KLU	14 Laporan	6,299,000	PAD		14	Laporan	7,200,869
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo KLU		9,380,100	PAD			6,986,683	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Diskominfo KLU	1 Dokumen	3,346,100	PAD		1	Dokumen	4,083,470

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo KLU	16 Laporan	6,034,000	PAD		16	Laporan	2,903,213
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin dan Kapasitas Aparatur Diskominfo	Diskominfo KLU		5,212,600	PAD				53,550,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya	Diskominfo KLU			PAD		72	Stel	31,500,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Diskominfo KLU			PAD		1	Laporan	15,750,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Diskominfo Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Diskominfo KLU	10 Paket	5,212,600	PAD		2	Orang	6,300,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo KLU	100 %	143,832,865	PAD		100	%	205,173,487
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo KLU	30 Stel	2,754,505	PAD		6	Paket	5,646,233.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo KLU	Laporan	13,189,560	PAD		10	Paket	23,038,061
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo KLU	2 Orang	15,454,800	PAD		3	Paket	25,116,494
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo KLU	2 Orang	3,540,000	PAD		3	Paket	9,522,844
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo KLU	1 Dokumen	3,120,000	PAD		1	Dokumen	6,879,600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo KLU	12 Laporan	105,774,000	PAD		12	Laporan	134,970,255
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	Diskominfo KLU	100 %	7,500,000	PAD		100	%	217,385,648
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Diskominfo KLU	2 (Sewa) 1 (Pengadaan)		PAD		3	Unit/Sewa	180,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Diskominfo KLU	2 paket		PAD		16	paket	7,385,648
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan komputer, Printer dan alat-alat elektronik	Diskominfo KLU	4 Paket	7,500,000	PAD		3	Unit	30,000,000
7	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	Diskominfo KLU	100 %	734,989,100	PAD		100	%	628,733,015
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo KLU	12 Laporan	7,461,400	PAD		12	Laporan	7,298,991
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo KLU	12 Laporan	207,877,700	PAD		12	Laporan	205,574,024
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo KLU	12 Laporan	519,650,000	PAD		12	Laporan	415,860,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	Diskominfo KLU	100 %	113,213,995	PAD		100	%	107,068,235
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo KLU	10 Unit	80,334,000	PAD		10	Unit	88,568,235
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskominfo KLU	11 Unit	22,429,995	PAD		13	Unit	8,500,000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo KLU	1 Unit	10,450,000	PAD		2	Unit	10,000,000
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase Informasi Publik dan Penyebarluasan Informasi Publik	Diskominfo KLU	100	306,279,600	PAD/DBHCHT		100		855,952,957
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diselenggarakan Diskominfo	Diskominfo KLU	100	306,279,600	PAD/DBHCHT		100		855,952,957
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	0 Dokumen	0	PAD/DBHCHT		3	Dokumen	36,750,000
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo KLU	1 Dokumen	9,367,000	PAD/DBHCHT		12	Laporan	35,397,968
3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	0 Dokumen	2,517,000	PAD/DBHCHT		13	Dokumen	35,000,000
4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	1 Dokumen	19,787,600	PAD/DBHCHT		1	Dokumen	58,371,201
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo KLU	1 Dokumen	175,992,000	PAD/DBHCHT		1	Dokumen	296,502,822
6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo KLU	1 Dokumen	14,483,500	PAD/DBHCHT		1	Dokumen	145,997,460
7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Diskominfo KLU	1 Dokumen	6,994,000	PAD/DBHCHT		1	Dokumen	9,900,340
8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Diskominfo KLU	1 Dokumen	26,703,500	PAD/DBHCHT		1	Dokumen	78,994,456
9	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diskominfo KLU	1 Dokumen	50,435,000	PAD/DBHCHT		1	Dokumen	159,038,710
III.	Program Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah KLU	Diskominfo KLU	80	275,352,000	PAD		80		3,488,473,456

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	Diskominfo KLU	100 Dokumen	0	PAD		100	Dokumen	304,361,442
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo KLU	1 Dokumen		PAD		1	Dokumen	31,403,500
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	1 Dokumen		PAD		1	Dokumen	272,957,942
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah KLU	Diskominfo KLU	100	275,352,000	PAD		100		3,184,112,014
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	Diskominfo KLU	1		PAD		1	Dokumen	24,607,800
2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo KLU	1 Dokumen	25,073,700	PAD		1	Dokumen	
3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	1 Unit	9,270,800	PAD		1	Unit	25,000,000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Diskominfo KLU	30 OPD	29,668,300	PAD		30	OPD	21,794,441
5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo KLU	2 Dokumen		PAD		1	Dokumen	472,500,000
6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	Dokumen		PAD		1	Dokumen	1,050,000,000
7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Diskominfo KLU	1 Dokumen	191,978,200	PAD		1	Dokumen	1,269,281,000
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo KLU	1 Perangkat Daerah	11,388,000	PAD		5	Perangkat Daerah	242,633,790

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
9	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo KLU	Unit		PAD		8	Unit	63,000,000
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Diskominfo KLU	1 Layanan	7,973,000	PAD		1	Layanan	15,294,983
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistik Sektoral yang terbangun	Diskominfo KLU	100	67,841,124	PAD		100		493,758,258
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Diskominfo KLU	100	67,841,124	PAD		100		493,758,258
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo KLU	1 Dokumen	35,160,700	PAD		1	Dokumen	244,030,988
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo KLU	20 Orang	7,200,000	PAD		30	Orang	41,418,720
3	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Diskominfo KLU	6 Dokumen	12,725,000	PAD		1	Dokumen	21,000,000
4	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Diskominfo KLU	40 Orang	12,755,424	PAD		30	Orang	31,500,000
5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Diskominfo KLU	2 Unit		PAD		3	Unit	103,308,550
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Diskominfo KLU	Dokumen		PAD		1	Dokumen	52,500,000
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di KLU	Diskominfo KLU		66,498,500	PAD				582,505,898
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Utara	Diskominfo KLU	85	66,498,500	PAD		85		524,674,260
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Yang Terlaksana	Diskominfo KLU	100	50,698,500	PAD		100		466,842,622
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Diskominfo KLU	Dokumen 2	3,747,000	PAD		1	Dokumen	11,052,563
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo KLU	4 Laporan	14,000,000	PAD		4	Laporan	220,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi entitas audit keamanan informasi	Diskominfo KLU	12 Laporan	2,513,500	PAD		12	Laporan	21,000,000
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo KLU	30 Perangkat Daerah	30,438,000	PAD		30	Perangkat Daerah	214,290,059
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara	Diskominfo KLU		15,800,000	PAD				57,831,638
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Diskominfo KLU	3 Perangkat Daerah	15,800,000	PAD		3	Perangkat Daerah	57,831,638
TOTAL ANGGARAN					4,582,420,568					9,773,425,381

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo KLU Tahun 2023

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023
dan Proyeksi Tahun 2024

NOMOR REKENING	URAIAN URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PRGOGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORTAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			JANIS BELANJA			JUMLAH PAGU RKPd 2023	PROYEKSI PAGU RKPd 2024	JENIS KEGIATAN	SUMBER DAN A
					TOLAK UKUR	TARGET	SATUAN	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL				
								BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG/ JASA					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2,786,389,484	1,745,096,084	50,935,000	4,582,420,568.00	9,773,425,381		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2,786,389,484	1,745,096,084	43,435,000	4,688,957,568	9,773,425,381		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Diskominfo KLU	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran dan perencanaan yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas	100	%	2,786,389,484	1,072,559,860	0	3,804,529,344	4,352,734,812		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Diskominfo KLU	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	0	38,461,500	0	38,461,500.00	43,051,523.00		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	0.00	22,505,500	0.00	22,505,500.00	27,502,524	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12	Dokumen	0.00	7,290,000	0.00	7,290,000.00	7,736,243	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	0.00	8,666,000	0.00	8,666,000.00	7,812,756	Lanjutan	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1		2,786,389,484	27,469,700	0	2,759,439,184	3,090,786,221	Lanjutan	
2.16.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2,731,969,484		0.00	2,731,969,484.00	2,978,900,000	Lanjutan	DAU
2.16.01.2.02.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	SPJ	54420000	13,710,500	0.00	13,710,500.00	97,691,312	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	0.00	7,460,200	0.00	7,460,200.00	6,994,040	Lanjutan	PAD

2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	Dokumen	0.00	6,299,000	0.00	6,299,000.00	7,200,869	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.02.07	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Diskominfo KLU	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13		0.00	9,380,100	0.00	9,380,100.00	6,986,683	Lanjutan	PAD
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		3,346,100			4,083,470	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	0.00	6,034,000	0.00	5,212,600.00	2,903,213	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.03.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Diskominfo KLU	Persentase Tingkat Disiplin dan Kapasitas Aparatur Diskominfo			0.00	5,212,600	0.00	5,212,600.00	53,550,000	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Diskominfo KLU	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya	30	Stel	0.00		0.00		31,500,000	Lanjutan	PAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Laporan					15,750,000	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah ASN Diskominfo Yang Meningkatkan Kapasitasnya	30	Orang	0.00	5,212,600	0.00	5,212,600.00	6,300,000	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.04.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Diskominfo KLU	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			0.00	143,832,865	0.00	143,832,865.00	205,173,487	Lanjutan	PAD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Jenis		2,754,505			5,646,233.00	Lanjutan	PAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Jenis		13,189,560			23,038,061	Lanjutan	PAD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Jenis		15,454,800			25,116,494	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Jenis	0.00	3,540,000	0.00	0.00	9,522,844	Lanjutan	PAD

2.16.01.2.05.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	900	Eksemplar	0.00	3,120,000	0.00	3,120,000.00	6,879,600	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.05.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	0.00	105,774,000	0.00	105,774,000.00	134,970,255	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.05.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Diskominfo KLU	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	100	%	0.00	0	0.00	0.00	217,385,648	Lanjutan	PAD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3	Unit					180,000,000	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.06	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	Unit	0.00		7,500,000.00	1,590,692,195.00	7,385,648	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.06.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Diskominfo KLU	Jumlah Pengadaan komputer, Printer dan alat-alat elektronik	6	Unit	0.00		7,500,000	7,500,000.00	30,000,000	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.06.02	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan			Diskominfo KLU	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100	%	0.00	734,989,100	0.00	734,989,100.00	628,733,015	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.06.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Surat	0.00	7,461,400	0.00	7,461,400.00	7,298,991	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.06.05	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	Tagihan/Rekening	0.00	207,877,700	0.00	207,877,700.00	205,574,024	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.06.06	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23	Orang	0.00	519,650,000	0.00	519,650,000.00	415,860,000	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.06.09	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi			Diskominfo KLU	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100	%	0.00	113,213,995	0.00	113,213,995.00	107,068,235	Lanjutan	PAD
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit		80,334,000			88,568,235	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.07	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	0.00	22,429,995		623,009,200.00	8,500,000	Lanjutan	PAD

2.16.01.2.07 .02	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Diskominfo KLU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0.00	10,450,000	0.00	10,450,000.00	10,000,000	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.07 .05	Program Informasi Dan Komunikasi Publik			Diskominfo KLU	Persentase Informasi Publik dan Penyebarluasan Informasi Publik	100		0.00	262,844,600	43,435,000	306,279,600.00	855,952,957	Lanjutan	PAD/DB HCHT
2.16.01.2.07 .06	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Diskominfo KLU	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diselenggarakan Diskominfo	100		0.00	262,844,600	43,435,000	306,279,600.00	855,952,957	Lanjutan	PAD/DB HCHT
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	Perda/Perbub		0			36,750,000	Lanjutan	PAD/DB HCHT
2.16.01.2.08	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	Opini/Aspirasi		9,367,000		198,296,600.00	35,397,968	Lanjutan	PAD/DB HCHT
2.16.01.2.08 .01	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	250	Berita/Informasi	0.00	2,517,000	0.00	2,517,000.00	35,000,000	Lanjutan	PAD/DB HCHT
2.16.01.2.08 .02	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	250	Kali	0.00	19,787,600	0.00	19,787,600.00	58,371,201	Lanjutan	PAD/DB HCHT
2.16.01.2.08 .04	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Laporan	0.00	175,992,000	0.00	175,992,000.00	296,502,822	Lanjutan	PAD/DB HCHT
	Pelayanan Informasi Publik				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5	Permohonan		14,483,500			145,997,460	Lanjutan	PAD/DB HCHT
2.16.01.2.09	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	30	Orang	0.00	6,994,000		302,055,500.00	9,900,340	Lanjutan	PAD/DB HCHT

2.16.01.2.09.02	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Diskominfo KLU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	23	KIM	0.00	26,703,500	0.00	26,703,500.00	78,994,456	Lanjutan	PAD/DBHCHT
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah KLU	3	Unit		7,000,000	43,435,000.00		159,038,710	Lanjutan	PAD/DBHCHT
2.16.01.2.09.06	Program Aplikasi Informatika			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	80		0.00	275,352,000	0.00	275,352,000.00	3,488,473,456	Lanjutan	PAD
2.16.01.2.09.09	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	100	%	0.00	0	0.00	0.00	304,361,442	Lanjutan	PAD
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	30	Sub Domain					31,403,500	Lanjutan	PAD
2.16.02	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, efektif dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif		Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah KLU	30	OPD	0.00		0.00	267,379,000.00	272,957,942	Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	100	%	0.00	275,352,000	0.00	267,379,000.00	3,184,112,014	Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	100	Orang	0.00		0.00	0.00	24,607,800	Lanjutan	PAD

2.16.02.2.01.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Perda/Peubup	0.00	25,073,700	0.00	25,073,700.00		Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			Diskominfo KLU	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	15	SKPD	0.00	9,270,800	0.00	9,270,800.00	25,000,000	Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			Diskominfo KLU	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	Aplikasi	0.00	29,668,300	0.00	29,668,300.00	21,794,441	Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01.06	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			Diskominfo KLU	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	Aplikasi	0.00			0.00	472,500,000	Lanjutan	PAD
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City		Jaaringan Internet					1,050,000,000	Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01.10	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	25	Lokasi	0.00	191,978,200	0.00	191,978,200.00	1,269,281,000	Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01.12	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	5	Laporan	0.00	11,388,000	0.00	11,388,000.00	242,633,790	Lanjutan	PAD
2.16.02.2.01.13	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			Diskominfo KLU	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		Orang	0.00		0.00	0.00	63,000,000	Lanjutan	PAD
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				Persentase Statistik Sektoral yang terbangun	1	Laporan		7,973,000			15,294,983	Lanjutan	PAD
2.16.03	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, efektif dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	100		0.00	67,841,124	0.00	236,298,124.00	493,758,258	Lanjutan	PAD

2.16.03.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	%	0.00	67,841,124	0.00	42,360,700.00	493,758,258	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Diskominfo KLU	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50	Buku	0.00	35,160,700	0.00	35,160,700.00	244,030,988	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.01.03	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			Diskominfo KLU	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30	Orang	0.00	7,200,000		7,200,000.00	41,418,720	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02	Membangun Meta Data Statistik Sektoral				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		%	0.00	12,725,000		193,937,424.00	21,000,000	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.01	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral			Diskominfo KLU	Jumlah Infrastruktur Statistik		%	0.00	12,755,424	0.00	12,755,424.00	31,500,000	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.02	Pengembangan Infrastruktur			Diskominfo KLU	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Unit	0.00		0.00	0.00	103,308,550	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah			Diskominfo KLU	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di KLU		%	0.00			0.00	52,500,000	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.06	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			Diskominfo KLU	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan			0.00	66,498,500	0.00	66,498,500.00	582,505,898	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.07	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Diskominfo KLU	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Yang Terlaksana	100	%	0.00	66,498,500		66,498,500.00	524,674,260	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Diskominfo KLU	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	100	%		50,698,500			466,842,622	Lanjutan	PAD

2.16.03.2.02.09	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Diskominfo KLU	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Perda/Perbup	0.00	3,747,000	0.00	3,747,000.00	11,052,563	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.10	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Diskominfo KLU	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi entitas audit keamanan informasi	70	Orang	0.00	14,000,000		14,000,000.00	220,500,000	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.11	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Diskominfo KLU	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	OPD		2,513,500			21,000,000	Lanjutan	PAD
2.16.03.2.02.12	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Diskominfo KLU	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara	80	%	0.00	30,438,000	0.00	30,438,000.00	214,290,059	Lanjutan	PAD
2.20	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100	%	#REF!	15,800,000	0.00	0.00	57,831,638	Lanjutan	PAD
2.20.02	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, efektif dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif		Persentase Statistik Sektoral Terlaksana	3	Paket	#REF!	15,800,000	0.00	0.00	57,831,638	Lanjutan	PAD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara disusun sebagai pelaksanaan dari Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026. Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara tahun 2023 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen yang kuat semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara. Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfo dapat melaksanakannya.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/ KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA LOMBOK UTARA

Periode Pelaksanaan : 2022

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Capaian Kinerja dan realisasi anggaran tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		x=12/7*100		13=6+12		14=13/5x100		15		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
				%	100	42,147,723,826			92	5,774,058,173	11	611,738,333	28	1,592,031,493	22	1,265,665,045	35	2,001,868,134	95	5,471,303,005	103	95	95	5,471,303,005	95	13		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan dalam Kategori Baik	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia Tahun n-1	%	100	12,894,772,339			92	2,462,845,738	13	310,556,867	33	803,974,965	23	568,104,004	31	768,634,876	100	2,451,270,712	108	100	100	2,451,270,712	100	19	Sekretariat
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	89	215,770,375			17	72,770,900	1	6,908,700	7	13,468,700	2	6,659,400	7	45,350,300	17	72,387,100	100	99	17	72,387,100	19	34	Kasubag Program dan Keuangan
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	137,840,187			4	58,373,000	1	6,908,700	1	7,475,900	1	3,139,600	1	40,466,200	4	57,990,400	100	99	4	57,990,400	17	42	Kasubag Program dan Keuangan
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	60	38,773,354			12	7,318,100			6	3,008,000	2	1,675,900	4	2,633,800	12	7,317,700	100	100	12	7,317,700	20	19	Kasubag Program dan Keuangan
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	39,156,833			1	7,079,800				2,984,800		1,843,900	1	2,250,300	1	7,079,000	100	100	1	7,079,000	0	18	Kasubag Program dan Keuangan
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		140	12,643,985,332			1	2,383,737,710	1	301,502,167	1	789,365,165	1	558,997,504	1	723,061,976	1	2,372,926,812	100	100	1	2,372,926,812	1	19	Kasubag Program dan Keuangan
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	35	12,083,221,618			22	2,269,391,910	22	290,022,167	25	755,984,865	25	534,474,904	25	679,737,676	25	2,260,219,612	114	100	25	2,260,219,612	71	19	Kasubag Program dan Keuangan
		2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	489,620,107			12	95,489,500	3	11,480,000	3	28,646,300	3	24,522,600	3	29,839,900	12	94,488,800	100	99	12	94,488,800	20	19	Kasubag Program dan Keuangan
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	35,053,500			1	9,883,500				2,296,300			1	7,544,200	1	9,840,500	100	100	1	9,840,500	20	28	Kasubag Program dan Keuangan

		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	40	36,090,108		14	8,972,800	0	6	2,437,700	4	4	5,940,200	14	8,377,900	100	93	14	8,377,900	35	23	Kasubag Program dan Keuangan		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Diskominfo KLU	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	%	100	5,754,300,260		92	871,636,437	10	89,360,466	30	259,184,634	17	149,994,569	34	298,089,333	91	796,629,002	99	91	91	796,629,002	91	14	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17	35,016,633		17	6,337,128	8	2,146,000	4	1,141,100	3	2,447,100	2	222,600	17	5,956,800	100	94	17	5,956,800	100	17	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	20,465,988		1	3,703,828		766,000		737,500	1	2,200,000		1	3,703,500	100	100	1	3,703,500	20	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	80	14,550,645		16	2,633,300	8	1,380,000	4	403,600	2	247,100	2	222,600	16	2,253,300	100	86	16	2,253,300	20	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin dan Kapasitas Aparatur Diskominfo		90	219,816,375			0		0		-					0	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Diskominfo Yang Diadakan		320	129,303,750							-					-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Sistem Informasi Kepegawaian yang Tersusun		1	64,651,875							-					-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Diskominfo Yang Meningkatkan Kapasitasnya		8	25,860,750							-					-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,028,311,135		100	224,198,400	4	9,263,900	15	33,763,300	11	24,957,200	53	118,278,579	83	186,262,979	83	83	83	186,262,979	83	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	28,298,415		6	5,121,300	0		2	1,700,000	1	1,252,200	3	2,169,100	6	5,121,300	100	100	6	5,121,300	20	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	115,464,696		10	20,896,200	2	2,476,700	2	1,466,000	4	12,442,500	2	4,447,000	10	20,832,200	100	100	10	20,832,200	20	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	125,881,616		3	22,781,400	1	4,095,700		1,280,000	1	8,162,500	1	7,773,200	3	21,311,400	100	94	3	21,311,400	20	17	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	47,727,640		3	8,637,500	1	1,436,500	1	495,000			1	6,661,100	3	8,592,600	100	99	3	8,592,600	20	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	34,479,939		1	6,240,000		780,000		1,300,000		2,600,000	1	1,560,000	1	6,240,000	100	100	1	6,240,000	20	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	676,458,829		12	160,522,000	1	475,000	3	27,522,300	2	500,000	6	95,668,179	12	124,165,479	100	77	12	124,165,479	20	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian

		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	%	100	1,026,916,204			100	54,599,000	0	0	80	43,559,000	-	-	18	8,000,000	98	51,559,000	98	94	98	51,559,000	98	5	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 (Set)	Unit	720,000,000								-						-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	65	37,016,204			2	14,699,000	0		2	6,699,000				8,000,000	2	14,699,000	100	100	2	14,699,000	3	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan komputer, Printer dan alat-alat elektronik	Paket	29	269,900,000			4	39,900,000	1		3	36,860,000					4	36,860,000	100	92	4	36,860,000	14	14	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	%	100	2,943,340,486			100	491,825,037	11	53,223,666	29	142,078,334	21	103,942,249	32	158,603,754	93	457,848,003	93	93	93	457,848,003	93	16	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36,581,889			12	6,620,400	3	910,500	3	465,000	3	1,509,900	3	3,015,800	12	5,901,200	100	89	12	5,901,200	20	16	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1,030,318,596			12	207,204,637	3	12,313,166	3	75,613,334	3	35,932,349	3	67,587,954	12	191,446,803	100	92	12	191,446,803	20	19	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1,876,440,000			12	278,000,000	3	40,000,000	3	66,000,000	3	66,500,000	3	88,000,000	12	260,500,000	100	94	12	260,500,000	20	14	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	%	100	535,916,061			100	101,014,000	25	26,872,900	39	39,784,000	21	21,095,120	13	13,207,000	98	100,959,020	98	100	98	100,959,020	98	19	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	443,896,061			10	80,334,000	10	24,847,900	10	28,684,000	3	20,145,120		6,653,000	10	80,330,020	100	100	10	80,330,020	100	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	42,770,000			11	10,320,000	3	2,025,000	1	1,850,000	1	950,000	6	5,445,000	11	10,270,000	100	100	11	10,270,000	18	24	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	49,250,000			1	10,360,000	0		1	9,250,000				1,109,000	1	10,359,000	100	100	1	10,359,000	100	21	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase Informasi Publik dan Penyebarluasan Informasi Publik		100	4,142,104,974			100	814,470,198	6	52,519,200	33	268,768,600	28	224,960,000	27	217,089,150	94	763,336,950	94	94	94	763,336,950	94	18	Bidang PIKP
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Yang Diselenggarakan Diskominfo		100	4,142,104,974			100	814,470,198	6	52,519,200	33	268,768,600	28	224,960,000	27	217,089,150	94	763,336,950	94	94	94	763,336,950	94	18	Seksi monitoring informasi dan komunikasi publik
		2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	5	71,750,000			0	0				-					-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi monitoring informasi dan komunikasi publik
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	5	177,411,443			1	33,107,000		10,000,000		13,107,000		8,025,000	1	1,950,000	1	33,082,000	100	100	1	33,082,000	20	19	Seksi monitoring informasi dan komunikasi publik

		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota	Dokumen	5	123,332,090			1	20,120,000	7,246,000	4,652,000			1	7,650,000	1	19,548,000	100	97	1	19,548,000	20	16	Seksi Tata Kelola E-Government		
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	5	107,816,000			1	14,056,000	732,000	1,084,000	1	2,800,000			1	4,616,000	100	33	1	4,616,000	20	4	Seksi Tata Kelola E-Government		
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	5	225,538,600			1	119,053,600		3,002,800		5,650,000	1	108,793,960	1	117,446,760	100	99	1	117,446,760	20	52	Seksi Tata Kelola E-Government		
		2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	30	109,231,784			30	31,018,200	6	1,560,000	6	6,558,200	6	300,000	12	21,800,000	30	30,218,200	100	97	30	30,218,200	100	28	Seksi Tata Kelola E-Government
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	6	2,100,690,250			2	48,734,000			2	48,734,000				48,734,000	-	100	-	48,734,000	-	2	Seksi Tata Kelola E-Government		
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	30	4,310,125,000												-	-	-	-	-	-	-	Seksi Tata Kelola E-Government		
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	5	4,513,050,000			1	237,597,000			69,893,294		20,505,612	1	110,058,639	30	200,457,545	###	84	30	200,457,545	600	4	Seksi Tata Kelola E-Government	
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	5	1,216,058,823			1	362,815,000	71,300,000		37,462,000		45,200,000	1	161,883,000	1	315,845,000	100	87	1	315,845,000	20	26	Seksi Tata Kelola E-Government	
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	38	258,607,500												-	-	-	-	-	-	-	Seksi Tata Kelola E-Government		
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	5	76,657,082			1	52,873,000			864,000		8,409,000	1	28,100,000	1	37,373,000	100	71	1	37,373,000	20	49	Seksi Tata Kelola E-Government	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistik Sektoral yang terbangun		95	2,379,434,068			100	312,475,200	14	44,857,500	13	39,278,000	29	91,852,700	34	107,541,140	91	283,529,340	91	91	91	283,529,340	96	12	Bidang Persandian dan Statistik
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		100	2,379,434,068			100	312,475,200	14	44,857,500	13	39,278,000	29	91,852,700	34	107,541,140	91	283,529,340	91	91	91	283,529,340	91	12	Kasi Statistik

		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5	1,223,061,455	1	221,343,300	33,357,500	37,700,000	57,002,700	1	72,554,900	1	200,615,100	100	91	1	200,615,100	20	16	Kasi Statistik			
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	30	207,586,915	20	37,568,000	4	11,500,000	5	1,578,000	5	11,650,000	6	10,840,000	20	35,568,000	100	95	20	35,568,000	67	17	Kasi Statistik
		2.20.02.2.01.03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	30	86,202,500	6																Kasi Statistik		
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	30	129,303,750	40																	Kasi Statistik	
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	6	517,773,198	2	53,563,900																Kasi Statistik	
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	100	215,506,250																		Kasi Statistik	
6	Meningkatnya Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di KLU		95	2,410,572,770	85	284,226,000	11	32,182,400	17	48,015,000	15	41,885,260	49	139,378,036	92	261,460,696	108	92	92	261,460,696	97	11	Kasi Persandian
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Utara		100	2,120,725,783	100	232,671,000	12	27,582,400	6	13,365,000	18	40,785,260	60	139,378,036	95	221,110,696	95	95	95	221,110,696	95	10	Seksi Persandian
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang	Dokumen	3	55,394,453	2	17,406,000				925,000	1	5,850,000	1	9,631,000	2	16,406,000	100	94	2	16,406,000	67	30	Seksi Persandian
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	15	905,126,250	4	29,540,000					4	24,063,336	4	24,063,336	100	81	4	24,063,336	27	3	Seksi Persandian		
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	30	86,202,500																		Seksi Persandian	
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30	1,074,002,579	30	185,725,000	5	27,582,400	5	12,440,000	5	34,935,260	15	105,683,700	30	180,641,360	100	97	30	180,641,360	100	17	Seksi Persandian
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara		100	289,846,987	100	51,555,000	9	4,600,000	67	34,650,000	24	1,100,000	0	-	100	40,350,000	100	78	100	40,350,000	100	14	Seksi Persandian

